

PERAN KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER DALAM MENJAGA DAN MENCIPTAKAN STABILITAS PEREKONOMIAN INDONESIA MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

Yolanda Britania¹
Dila Septiani²
Muhammad Heru Ghibran³
Dr. Pani Akhiruddin Siregar, MA⁴

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email:

ylnbritania@gmail.com
upshut985@gmail.com
mherughبران@gmail.com
paniakhiruddin@umsu.ac.id

Received : Jan 19 th 2024	Revised : March 17 th 2024	Accepted : May 30 th 2024
--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk memahami peran kebijakan fiskal dan moneter dalam menjaga stabilitas ekonomi menurut sudut pandang Islam. Dalam konteks ini, stabilitas ekonomi berpengaruh signifikan terhadap stabilitas keseluruhan negara. Kestabilan ekonomi suatu negara sangat tergantung pada kebijakan ekonomi, terutama kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter adalah dua alat utama yang dipakai pemerintah untuk mencapai tujuan stabilisasi ekonomi. Perlunya kebijakan fiskal oleh pemerintah adalah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran pajak guna memengaruhi kinerja perekonomian negara tersebut. Selanjutnya, peran kebijakan moneter penting dalam mengatur perekonomian melalui kontrol penawaran uang oleh Bank Sentral untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Kajian Pustaka dengan mengacu pada beberapa jurnal serta artikel dari website atau internet digunakan dalam metode penelitian kualitatif ini. Penelitian menyatakan bahwa dalam pandangan Islam, Kebijakan fiskal dan Kebijakan moneter memegang peran krusial dalam menjaga serta menciptakan stabilitas ekonomi di Indonesia.

Kata kunci : *Kebijakan Fiskal, Kebijakan Moneter, Stabilitas perekonomian*

PENDAHULUAN

Perekonomian merupakan aktivitas yang ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sebagai pemegang mandat dituntut agar mampu melakukan pengelolaan perekonomian, baik dalam skala mikro ataupun yang lebih luas dalam skala makro. Salah satu tugas pemerintah dalam pengelolaan perekonomian adalah menciptakan dan menjaga stabilitas perekonomian. Stabilitas negara secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh stabilitas perekonomian.

Dalam ilmu ekonomi, stabilitas didefinisikan sebagai ketika seluruh ekonomi berjalan sesuai rencana, dapat dikendalikan, dan berkesinambungan satu sama lain. Usaha untuk menjaga perekonomian negara tetap stabil dikenal sebagai stabilitas ekonomi. Kebijakan fiskal dan moneter, yang merupakan dua instrumen utama yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan stabilisasi ekonomi, sangat memengaruhi stabilitas perekonomian negara. Untuk menjaga stabilitas perekonomian yang sehat, pemerintah harus membuat kebijakan

fiskal dan moneter yang seimbang dan tepat serta mengkoordinasikan kebijakan tersebut dengan baik.

Upaya pemerintah untuk mengatasi masalah perekonomian melalui modifikasi sistem perpajakan atau belanja disebut sebagai kebijakan fiskal. Sejak awal, tatanan ekonomi Islam telah menempatkan kebijakan fiskal sebagai hal yang sangat penting. Kebijakan perpajakan dianggap sebagai sarana untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia, dan hal ini dipengaruhi oleh insentif yang diperoleh dari peningkatan pendapatan pemerintah melalui pajak, pinjaman, atau jaminan atas pengeluaran pemerintah. Tujuan kebijakan perpajakan Islam mungkin adalah untuk membangun masyarakat yang ditandai dengan distribusi kekayaan yang adil, dimana aspek material dan spiritual memiliki arti yang sama. Dalam Islam, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat mencakup berbagai mekanisme seperti zakat, infaq, dan sedekah, yang diselenggarakan melalui lembaga yang disebut Baitul Mal. Kebijakan moneter pada dasarnya difokuskan pada pencapaian tujuan menjaga stabilitas tingkat harga. Dengan meningkatkan dan menurunkan jumlah uang beredar, kebijakan yang diambil oleh bank sentral mempengaruhi perekonomian. Peran bank sentral dalam melaksanakan kebijakan moneter melalui berbagai instrumen diharapkan dapat meredam berbagai gejolak yang ditimbulkan oleh perekonomian global. Dalam mengendalikan perekonomian secara makro, kebijakan moneter dengan memperhatikan ukuran standard moneter menjadi salah satu Solusi untuk memperbaiki aturan perekonomian dalam peredaran uang. Upaya ini dilakukan dalam rangka memperoleh stabilitas dari segi harga dan inflasi. Diantara kebijakan moneter yang diterapkan oleh Rasulullah SAW yaitu penetapan Dinar dan Dirham sebagai mata uang resmi dan larangan transaksi riba.

Terlepas dari pemaparan diatas, penelitian ini akan berfokus untuk membahas mengenai apa saja peran dari kebijakan fiskal dan moneter dalam menjaga dan menciptakan stabilitas perekonomian Indonesia menurut Perspektif islam.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang mengatur kinerja ekonomi melalui penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mengatur seluruh pendapatan dan pengeluaran negara untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedua jenis kebijakan fiskal adalah aktif (pemerintah mengubah tingkat pajak atau rencana pengeluaran) dan pasif. Kebijakan yang dikenal dengan kebijakan fiskal pasif adalah kebijakan yang cenderung meningkatkan surplus pemerintah (mengurangi defisit pemerintah) atau meningkatkan surplus pemerintah tanpa adanya tindakan tegas dari pengambil kebijakan. Imam al-Ghazali meyakini bahwa kebijakan fiskal merupakan cara untuk mencapai tujuan hukum syariah, seperti meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, kekayaan, kepemilikan dan kecerdasan. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa kebijakan fiskal mempunyai tiga fungsi besar: alokasi, alokasi dan stabilisasi. Dengan memotong pajak dan meningkatkan belanja pemerintah, kebijakan fiskal dapat menjadi penangkal resesi dan menciptakan stabilitas perekonomian. Tujuan dari kebijakan fiskal sendiri adalah untuk membuat masyarakat bertanggung jawab atas kemiskinan dan krisis ekonomi.

Dalam kebijakan fiskal menurut perspektif islam, pemasukan atau pendapatan negara bersumber dari beberapa instrument sebagai berikut:

a. ZISWA

Zakat dalam agama Islam

mengacu pada sejumlah kekayaan tertentu yang dibagikan kepada individu yang memenuhi kriteria tertentu dan memenuhi kewajibannya. Zakat merupakan salah satu bentuk pendapatan di negara-negara Islam yang digunakan sebagai penyeimbang dan sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, dan jumlahnya biasanya lebih kecil dibandingkan pajak. Namun infaq, wakaf dan sedekah merupakan pemberian sukarela yang sangat dianjurkan dalam Islam.

- b. Kharaj
Pajak yang dikenal sebagai Kharaj dipungut atas tanah milik pribadi. Sesuai aturan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak ini dikenakan setiap tahun atas seluruh tanah dan bangunan milik pribadi. Namun pajak tersebut tidak ditentukan berdasarkan zonasi atau klasifikasi lahan, melainkan berdasarkan tingkat produktivitas lahan tersebut.
- c. Jizyah
Jizyah adalah pajak yang dibayarkan oleh non-Muslim sebagai imbalan atas fasilitas sosial, ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan yang mereka terima dari negara Islam. Pada era sekarang jizyah bisa dikatakan seperti pajak hidup yang dipungut pemerintah terhadap orang asing yang masuk dan tinggal di wilayah pemerintahan, disini disebut dengan visa.
- d. Khums
Dana yang berasal dari ghanimah yaitu seperlima rampasan perang disebut

dengan khums. Surat Al-Anfal khususnya ayat 41 membahas tentang pembagian harta rampasan tersebut. Menurut ulama Syiah, khumus harus diterapkan pada segala bentuk pendapatan dengan tarif 20%. Di sisi lain, ulama Sunni berpendapat bahwa ayat ini hanya berkaitan dengan rampasan perang. Namun Imam Abu Ubaid sebagaimana dikutip Adiwarmanto A. Karim berpendapat bahwa khumus mencakup barang-barang yang ditemukan dan diambil, tidak hanya sebatas rampasan perang.

- e. Usyur
Di negara-negara Islam, terdapat pungutan yang disebut dengan Usyur yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk atau berasal dari negara-negara tersebut. Pajak yang berbentuk bea masuk ini dipungut setiap tahun dan berlaku khusus untuk pedagang. Perlu diketahui bahwa pajak ini hanya berlaku untuk barang-barang yang berasal dari negara Islam itu sendiri, dengan syarat nilainya melebihi 200 dirham.
- f. Pinjaman
Dalam ekonomi Islam, sistem riba dan bunga tidak dikenal, dan konsep pemungutan pajak, bagi hasil, pinjaman, kredit, dan utang semuanya dianggap sebagai sumber pendapatan sekunder, baik di dalam negeri maupun internasional.
- g. Penerimaan lainnya
Kaffarat adalah denda. Dalam kasus di mana seseorang meninggal dan tidak memiliki ahli waris, harta warisannya

dimasukkan sebagai pendapatan negara.

Secara umum, anggaran negara Islam terbagi menjadi:

- a. Belanja untuk Pengeluaran untuk keperluan operasional penting pemerintah.
- b. Belanja umum yang dilakukan oleh pemerintah terlibat dalam pengeluaran umum ketika sumber daya keuangan melimpah.
- c. Belanja umum yang berkaitan dengan Pendanaan publik dialokasikan untuk proyek-proyek yang disetujui masyarakat, termasuk pembangunan jalan, lembaga pendidikan, dan jembatan.

Kebijakan Moneter

Pengaturan jumlah uang beredar dalam perekonomian yang disebut dengan kebijakan moneter dilakukan untuk memastikan kondisi makroekonomi berfungsi sesuai ekspektasi. Hal ini melibatkan pengelolaan jumlah uang yang beredar dengan tujuan menstabilkan harga dan mengendalikan inflasi. Sebagai otoritas moneter, bank sentral bertanggung jawab menjaga keseimbangan antara jumlah uang beredar dan ketersediaan barang. Hal ini penting untuk mencegah inflasi, meningkatkan lapangan kerja, dan memfasilitasi kelancaran arus barang dan jasa.

- a. Kebijakan moneter ekspansif, yang meningkatkan sirkulasi uang.
- b. Kebijakan moneter kontraktif, yang mengurangi jumlah uang yang beredar.

Kebijakan moneter mencakup berbagai alat seperti kebijakan pasar terbuka (operasi pasar terbuka), persyaratan cadangan minimum, perhitungan suku bunga, diskon, dan bujukan moral. Indikator dan orientasi berfungsi sebagai komponen utama kebijakan moneter, yang akan dijelaskan

di bawah ini. Indikator dan orientasi kebijakan moneter mencakup aspek-aspek berikut.

a. Tingkat Suku Bunga

Penentuan tingkat suku bunga yang optimal untuk merangsang investasi merupakan tujuan utama dari kebijakan moneter yang berfokus pada suku bunga. Untuk mencapai hal ini, bank sentral menerapkan langkah-langkah ekspansi moneter untuk menurunkan suku bunga ketika melebihi tingkat yang diinginkan, dan sebaliknya, menaikkan suku bunga ketika turun di bawah tingkat yang diinginkan.

b. Uang beredar

Kebijakan moneter dengan agregat moneter (uang yang beredar) sebagai sasaran antara (intermediate target) memberikan dampak positif berupa stabilisasi suku bunga. Jika jumlah uang berfluktuasi, yaitu melebihi atau turun di bawah jumlah yang ditetapkan, maka bank sentral akan memperketat atau memperluas uang untuk menjaga jumlah uang pada jumlah yang ditetapkan.

Dari pemaparan diatas, perlu diingat Kembali bahwa islam melarang keras adanya praktik riba dalam sistem perekonomian. Untuk itu pada zaman Rasulullah SAW terdapat beberapa kebijakan moneter yang ditetapkan olehnya, diantaranya sebagai berikut.

1. Penetapan Dirham dan Dinar sebagai mata uang resmi: Dirham dan dinar yang terbuat dari logam mulia seperti emas dan perak cenderung stabil seiring waktu, yang dapat mengurangi volatilitas dan fluktuasi nilai mata uang, membantu menjaga stabilitas

harga dan mencegah inflasi di negara yang menerapkannya.

2. Larangan Transaksi Riba
Kebijakan moneter sebenarnya bukannya hanya mengutamakan suku bunga, Bahkan pada zaman Rasulullah SAW, kebijakan moneter dijalankan tanpa instrumen bunga atau riba. Selain itu, teori ekonomi mengatakan bahwa inflasi disebabkan oleh suku bunga yang tinggi. Di Indonesia, bunga sudah membebani APBN untuk membayar bunga obligasi perbankan konvensional yang telah dibantu oleh Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Stabilitas Perekonomian

Stabilitas Dalam ilmu ekonomi, stabilitas didefinisikan sebagai ketika seluruh ekonomi berjalan sesuai rencana, dapat dikendalikan, dan berkesinambungan satu sama lain. Usaha untuk menjaga agar perekonomian suatu negara tetap berada pada level yang stabil dikenal sebagai stabilitas ekonomi. Dalam jangka panjang, perekonomian yang stabil akan mengurangi ketidakpastian dan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Tentu saja, stabilitas ekonomi akan dicapai hanya jika kebijakan fiskal dan moneter diterapkan dengan baik.

METODE PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan analisis deskriptif kualitatif yang menjelaskan fenomena, data, dan penelitian sebelumnya, dan selanjutnya menarik kesimpulan dari subjek yang relevan. Pilihan untuk menggunakan metode penelitian ini berakar pada kecenderungan pendekatan kualitatif untuk menggali topik atau permasalahan dengan lebih mendalam, akurat, dan jelas, sambil mengandalkan bukti faktual. Untuk mengumpulkan data, peneliti

menggunakan teknik penelitian kepustakaan, yang termasuk dalam ranah sumber data sekunder yang dapat membuktikan keabsahan informasi. Untuk mencapai hal ini, peneliti menggunakan literatur primer yang terdiri dari jurnal, artikel, dan laporan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pokok bahasan yang dibahas.

HASIL

Peran Kebijakan Fiskal terhadap Stabilitas Perekonomian di Indonesia menurut Pandangan Islam

Kebijakan fiskal Islam diharapkan dapat secara efektif melaksanakan tugas alokasi, distribusi, dan stabilisasi di negara-negara yang memiliki karakteristik khusus mengenai orientasi nilai, dimensi etika, dan dimensi sosial dalam pendapatan dan pengeluaran negara-negara Islam. Kebijakan fiskal Islam memiliki karakteristik berikut:

- a. Pengeluaran negara yang dilakukan berdasarkan pendapatan untuk mengurangi deficit anggaran
- b. Sistem perpajakan yang berjalan secara proporsional dikenal dengan sistem pajak proporsional. Misalnya, dalam kasus Kharaj, besaran pajak dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kesuburan tanah, metode irigasi yang digunakan, dan jenis tanaman tertentu yang dibudidayakan.
- c. Penghitungan zakat perdagangan ditentukan oleh keuntungan yang dihasilkan, bukan kuantitas barangnya. Adapun zakat untuk perdagangan, jumlah zakatnya berasal dari keuntungan yang diperoleh, sehingga tidak memperhitungkan biaya produksi.

Menurut hukum Islam, kebijakan fiskal adalah hak rakyat. Oleh karena itu, kebijakan fiskal harus difokuskan pada pembentukan sistem distribusi ekonomi yang adil daripada hanya meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Kebijakan fiskal melakukan banyak hal dalam perekonomian negara. *Pertama*, tujuan kebijakan fiskal adalah membantu perekonomian mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi. Dalam hal ini, kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah pemotongan pajak. Jika pajak lebih rendah, konsumen akan memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan dan diinvestasikan. Kemudian, dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal juga berfungsi untuk menjaga stabilitas dan kontrol anggaran pengeluaran dan belanja pemerintah. *Kedua*, untuk mengurangi pengangguran, membuka lebih banyak kesempatan kerja. Perekonomian negara akan terjejas oleh peningkatan pengangguran. Perlambatan pertumbuhan ekonomi menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran. Dimungkinkan untuk mengurangi tingkat pengangguran dengan menciptakan lebih banyak lapangan kerja jika anggaran belanja pemerintah digunakan untuk pembangunan infrastruktur. *Ketiga*, mendorong investasi melalui Tax holiday, Tax Allowance, Super Deduction Tax dan pengendalian impor (berupa mengatasi problem deficit ganda dalam neraca pembayaran, mendorong public untuk lebih produktif, memperjuangkan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi serta mengembangkan produktifitas dan daya saing). *Keempat*, Meningkatkan sektor pertanian.

Peran Kebijakan Moneter terhadap Perekonomian di Indonesia Menurut Pandangan Islam

Salah satu komponen stabilitas nasional dan tujuan pembangunan

nasional adalah mempertahankan stabilitas moneter. Kebijakan moneter yang stabil sangat memengaruhi aktivitas ekonomi. Untuk menciptakan kondisi perekonomian yang harmonis, bank sentral harus memiliki kemampuan untuk menjaga stabilitas moneter. Jika dibandingkan dengan negara maju, kebijakan moneter memiliki peran yang lebih besar di negara berkembang seperti Indonesia. Untuk mencapai tingkat stabilitas yang lebih baik dalam jumlah uang beredar, sangatlah penting untuk menerapkan pendekatan yang cermat terhadap belanja domestik dan perdagangan internasional. Hal ini akan memastikan bahwa kebijakan fiskal, yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah, seimbang secara harmonis. Perbankan di Indonesia memainkan peran penting dalam proses ini dengan menerapkan kebijakan moneter makroprudensial melalui pemanfaatan instrumen yang tersedia. Tujuan utama kebijakan moneter adalah untuk mengawasi dan mempengaruhi stabilitas, aktivitas, dan pertumbuhan perekonomian. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, dan selanjutnya diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, Bank Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menjaga laju inflasi dengan menjaga kestabilan nilai rupiah yang pada akhirnya mempengaruhi harga barang dan jasa. Sejak Juli 2005, Bank Indonesia telah menerapkan Inflation Targeting Framework (ITF) sebagai kerangka kebijakan moneternya. ITF dirancang khusus untuk mencapai target inflasi di masa depan, yang dipublikasikan untuk menunjukkan komitmen dan akuntabilitas bank sentral. Sebagai otoritas dan lembaga moneter yang bertugas menstabilkan sistem keuangan, Bank Indonesia berpegang pada prinsip-prinsip ekonomi dan nilai-nilai keuangan syariah dalam menjalankan operasionalnya dan mendorong pembangunan ekonomi melalui keuangan syariah. Hal ini dicapai

dengan menerapkan kebijakan pasar terbuka, menetapkan cadangan minimum, menetapkan tingkat diskon, dan menggunakan bujukan moral sebagai bagian dari kerangka kebijakan moneter. Tujuan utama kerangka ini adalah untuk menjamin stabilitas perekonomian, meningkatkan kesempatan kerja, menjaga stabilitas harga, mendorong stabilitas neraca pembayaran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tujuan-tujuan ini selaras dengan komitmen Bank Indonesia terhadap transparansi, tata kelola yang baik, keadilan, dan produktivitas, dalam upaya mencapai target inflasi di masa depan yang dikomunikasikan kepada masyarakat.

Dalam sistem moneter konvensional, tujuan utama alat kebijakan moneter adalah untuk mengatur aliran mata uang di masyarakat. Namun prinsip Islam melarang penggunaan instrumen berbasis bunga di pasar, sehingga menggeser fokus kebijakan moneter Islam ke arah menjaga sirkulasi sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, badan pengatur harus memastikan ketersediaan badan usaha dan ekonomi untuk mendukung tujuan tersebut. Produk keuangan syariah memainkan peran penting dalam menarik potensi investasi dari masyarakat, mengurangi waktu yang dibutuhkan pemodal untuk menyimpan uang mereka seminimal mungkin. Namun, hal ini secara tidak sengaja dapat menghambat kecepatan pertumbuhan ekonomi. Intinya, penerapan peraturan yang mendorong peluang usaha, produk keuangan syariah, dan langkah-langkah lain terkait aliran dana akan berkontribusi pada percepatan perekonomian.

Tujuan kebijakan moneter Islam konsisten dengan kebijakan moneter secara keseluruhan, termasuk menjamin stabilitas mata uang domestik dan internasional, mendorong keragaman instrumen keuangan, menjaga likuiditas,

mendorong transparansi sistem keuangan, dan membangun mekanisme pasar yang efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun terdapat perbedaan mendasar antara prinsip moneter konvensional dengan prinsip moneter berbasis syariah. Prinsip syariah melarang penggunaan jaminan nilai nominal atau suku bunga. Akibatnya, penerapan kebijakan moneter berbasis syariah tidak dapat dicapai melalui penyesuaian otomatis suku bunga sebagai target operasional agar selaras dengan tujuan kebijakan. Namun demikian, menurut banyak pakar ekonomi Islam, instrumen kebijakan moneter konvensional tertentu, termasuk rasio cadangan deposito, suasion moral, dan penyesuaian basis moneter, masih dapat digunakan untuk tujuan pengaturan mata uang dan kredit, baik dalam skala luas maupun dalam skala besar, secara tepat sasaran. Sekuritas ekuitas juga dapat berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan operasi pasar terbuka.

M. Umer Chapra menegaskan, agar mekanisme instrumen kebijakan moneter selaras dengan syariah Islam, harus mencakup enam elemen penting, yaitu sebagai berikut:

1. **Target Pertumbuhan *M* dan *Mo*.** Setiap tahunnya, bank sentral bertugas menentukan perluasan peredaran uang (*M*) sesuai dengan tujuan perekonomian bangsa. Pertumbuhan *M* sangat terkait dengan perluasan uang yang beredar dan cadangan devisa yang dimiliki oleh bank sentral. Sangat penting bagi bank sentral untuk secara cermat memantau alokasi dana kepada pemerintah, bank komersial, dan lembaga keuangan, untuk memastikan

bahwa proporsinya ditetapkan berdasarkan kondisi perekonomian dan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

2. **Saham Publik terhadap Deposito Atas Unjuk/Uang Giral.** Untuk membiayai inisiatif sosial yang bermanfaat, bank komersial wajib mengalokasikan sebagian tertentu dari giro mereka (hingga 25%) kepada pemerintah. Dana ini berkontribusi pada produksi dan distribusi barang dan jasa penting yang memenuhi kebutuhan berbagai lapisan masyarakat.
3. **Cadangan Wajib Resmi.** Bank komersial harus menyetorkan sejumlah cadangan wajib ke bank sentral. Persyaratan cadangan wajib membantu mengamankan simpanan dan membantu menyediakan likuiditas yang cukup bagi bank.
4. **Pembatasan Kredit.** Untuk mempertahankan target moneter dan mendorong persaingan yang sehat di antara bank-bank komersial, kebijakan tersebut menetapkan batas kredit yang menentukan sejauh mana penciptaan kredit.
5. **Alokasi Kredit yang Berorientasi pada Nilai.** Peningkatan kesejahteraan masyarakat memerlukan pencapaian kredit. Alokasi kredit mempunyai pengaruh langsung terhadap cadangan bank umum.
6. **Teknik Lain.** Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, penting untuk melengkapi teknik kualitatif dan kuantitatif tersebut dengan alat tambahan, seperti persuasi etis.

Berikut di bawah ini negara-negara yang menggunakan sistem kebijakan moneter Islam:

1. **Regulasi Moneter Iran,** Iran adalah negara yang mendeklarasikan dirinya sebagai republik Islam pada tahun 1979. Melalui gerakan revolusioner yang dipimpin oleh Khomeini, sistem politik Iran diubah dari kerajaan/monarki yang semula menjadi Republik Islam. Sesuai dengan prinsip Islam, sistem ekonomi dan kebijakan moneter di Iran diatur oleh Republik Islam Iran. Pemerintah Republik Islam Iran telah mengamanatkan bahwa bank-bank Iran harus menghapuskan sistem riba sebagai bagian dari kebijakan moneter mereka. Kebijakan ekonomi Iran berpedoman pada prinsip hukum syariah, sehingga mengharuskan penghapusan unsur-unsur yang dilarang Islam dan diganti dengan unsur-unsur yang sejalan dengan ajaran Islam. Pihak berwenang di Iran menggunakan berbagai instrumen moneter untuk mengelola perekonomian mereka, termasuk Rasio Persyaratan Cadangan, operasi pasar terbuka yang disesuaikan, tingkat diskon, plafon kredit, dan rasio keuntungan minimum yang diharapkan dari bank, serta bagian keuntungan bank dalam berbagai kontrak.
2. **Regulasi Moneter Saudi Arabia,** Syekh Mohammed Abdul Wahab mempunyai peranan yang sangat penting dalam berdirinya Kerajaan

Arab Saudi, yang menjadikan Abdul Aziz bin Abdulrahman Al Saud sebagai raja pertama berupaya menjadikan Arab Saudi sebagai negara yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam. Nabi menjalankan pemerintahannya. Sebagai negara yang menganut dan berlandaskan prinsip syariah, Arab Saudi menjalankan aktivitas moneter dengan menggunakan peraturan moneter yang memasukkan prinsip syariah.

3. **Regulasi Moneter Pakistan,** Arab Saudi, sebagai negara yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, menjalankan operasi moneter sesuai dengan peraturan yang mencakup prinsip-prinsip syariah. Sejak didirikan, Pakistan telah menganut prinsip-prinsip Syariah, yang sangat mempengaruhi sistem perbankan negara tersebut, sebagaimana ditentukan oleh konstitusi berbasis Islam. Pakistan telah membentuk departemen di bank sentralnya untuk mengelola ekonomi Islam, yang salah satu tugasnya adalah mempelajari konsep-konsep ekonomi Islam.
4. **Regulasi Moneter Indonesia** Indonesia merupakan negara yang menganut konsep ganda yaitu ekonomi konvensional dan hukum syariah dalam kebijakan ekonominya, sehingga kebijakan moneter perlu diatur. Untuk mencapai tujuan Kebijakan Moneter Syariah (OMS), Bank Indonesia baru-baru ini menerbitkan Peraturan Bank Indonesia

Nomor: 10/36/PBI/2008 yang fokus pada pelaksanaan Pengendalian Mata Uang Syariah. Peraturan ini menekankan pentingnya menjaga stabilitas nilai mata uang, karena berdampak langsung terhadap pembangunan ekonomi suatu negara secara keseluruhan. Memastikan stabilitas nilai mata uang adalah hal yang paling penting dalam pengelolaan mata uang Islam, karena hal ini menandakan stabilitas tingkat harga yang diperlukan untuk mencapai tujuan ekonomi.

KESIMPULAN

Kebijakan fiskal mencakup upaya pemerintah untuk mengatur kinerja perekonomian melalui pengelolaan mekanisme pendapatan dan belanja pemerintah. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah untuk mengatur seluruh pendapatan dan pengeluaran nasional dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ada dua kategori kebijakan fiskal yang berbeda: kebijakan fiskal aktif dan kebijakan fiskal pasif. Kebijakan fiskal aktif melibatkan pemerintah yang menerapkan perubahan tingkat pajak atau rencana pengeluaran. Di sisi lain, kebijakan fiskal pasif mengacu pada kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan defisit atau surplus pemerintah tanpa memerlukan tindakan tegas dari pembuat kebijakan. Indikator dan pedoman kebijakan moneter adalah sebagai berikut. Ketiga, Islam dengan tegas melarang riba dalam sistem perekonomian.

Stabilitas perekonomian merupakan upaya untuk menjaga kestabilan tingkat stabilitas perekonomian suatu negara.

Perekonomian yang stabil akan mengurangi ketidakpastian perekonomian dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dalam jangka panjang.

Di negara Islam, kebijakan fiskal bertugas memenuhi fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi, dengan mempertimbangkan karakteristik unik dari nilai-nilai masyarakat, etika, dan dimensi sosial dalam hal pendapatan dan pengeluaran. Meningkatnya pengangguran dapat disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan sistem keuangan konvensional, di mana bunga digunakan sebagai alat untuk mengatur jumlah uang beredar, regulator harus memprioritaskan pengembangan usaha ekonomi dan produk keuangan syariah untuk menarik investasi publik.

Tujuan mendasar dari kebijakan moneter Islam sejalan dengan kebijakan moneter konvensional, yaitu menjaga stabilitas mata uang, menetapkan berbagai instrumen keuangan, memastikan likuiditas, mendorong transparansi dalam sistem keuangan, dan menerapkan mekanisme pasar yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Arab Saudi, negara yang didirikan dan berkomitmen pada prinsip-prinsip syariah Islam, menjalankan operasi moneternya sesuai dengan peraturan ini. Ketika suatu negara memiliki Konstitusi yang berdasarkan Islam, maka bank-bank di negara tersebut akan mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Pakistan telah membentuk divisi untuk mengawasi ekonomi Islam di bank sentralnya, salah satu tanggung jawabnya adalah mempelajari konsep-konsep ekonomi Islam. Bank sentral Indonesia menerapkan konsep ganda dalam kebijakan ekonominya, yang mencakup prinsip konvensional dan Islam, sehingga memerlukan pengelolaan kebijakan moneter yang cermat.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian dan kesimpulan, saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan pemerintah Indonesia untuk secara efektif menjaga stabilitas moneter merupakan aspek dan tujuan penting dari kemajuan nasional. Kehadiran kebijakan moneter yang stabil juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap upaya perekonomian.
2. Bank Indonesia, sebagai lembaga yang bertanggung jawab menjaga otoritas moneter dan stabilitas sistem keuangan di Indonesia, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi keuangan syariah. Pembangunan ini harus mencakup prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, dan tata kelola yang efektif. Melalui penyediaan peluang perekonomian, produk keuangan syariah, dan regulasi terkait peredaran uang di masyarakat, Bank Indonesia berupaya mempercepat kemajuan perekonomian.
3. Indonesia, dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, diperkirakan akan mengikuti jejak negara-negara lain yang menerapkan strategi keuangan Islam, seperti Arab Saudi, negara yang telah mencapai perkembangan signifikan dalam skala global. Dimana Saudi Arabia yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam regulasi moneter nya dapat bersaing dengan negara-negara maju lainnya yang menggunakan prinsip konvensional, hal tersebut membuktikan bahwa kebijakan moneter Islam

dapat bersaing secara seimbang dengan kebijakan moneter konvensional.

4. Terdapat pandangan optimis bagi para peneliti di masa depan untuk mendalami kajian tentang bagaimana kebijakan fiskal dan kebijakan moneter berkontribusi dalam menjaga dan membangun stabilitas perekonomian di Indonesia dari sudut pandang Islam, dan tidak membatasi ruang lingkungannya hanya pada Indonesia saja. Diharapkan para peneliti di masa depan akan memiliki kapasitas untuk melakukan analisis komparatif kebijakan moneter dan fiskal antara Indonesia dan negara-negara lain yang juga menganut prinsip-prinsip Syariah dalam kerangka keuangan dan peraturan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- A, F. R., & Aimon, H. (2022). Analisis Dampak Instrumen Kebijakan Moneter Terhadap Stabilitas Perekonomian di Indonesia. *JKEP: JURNAL KAJIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN*, 21-28.
- Aini, I. (2019). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, 43-50.
- Arif, M. M., & Tohari, A. (2006). PERANAN KEBIJAKAN MONETER DALAM MENJAGA STABILITAS PEREKONOMIAN INDONESIA SEBAGAI RESPON TERHADAP FLUKTUASI PEREKONOMIAN DUNIA. *Bulletin Of Monetary Economics and Banking*.
- Ayyub, Anshory, M. N., & Pradiandy, H. (n.d.). PERAN KEBIJAKAN FISKAL DALAM MENGATASI KRISIS PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *JEI (Jurnal Ekonomi Islam)*.
- Aziz, R. A., & Setiawan, I. (2023). Kebijakan Moneter di Negara Islam dan Negara Muslim: Iran, Pakistan, Saudi Arabia, dan Indonesia. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 210-214.
- Handoko, D. O., Putra, P. A., Ismail, R., & Soemitra, A. (2023). BAURAN KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER TERHADAP PEREKONOMIAN DALAM PERSPEKTIF SYARIAH. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking dan Finance*, 12-20.
- Mujasmara, D. F., Panggabean, R. T., Muliana, R. S., Nugrahadi, E. W., & Rinaldi, M. (2023). Peran Kebijakan Fiskal Terhadap Perekonomian Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 1-12.
- Nurlina, & Zurjani. (2018). Dampak Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Perekonomian Indonesia. *JURNAL SAMUDRA EKONOMIKA*, 126-136.
- Paramita, R. (2021). EFEKTIVITAS KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER DALAM MENGATASI INFLASI DI INDONESIA PERIODE 1984-2019. *JURNAL BUDGET*, 152-168.
- Pardamean, A. T. (n.d.). DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA. *QE Journal*, 36-

51.

- Putra, M. U. (2015). PERAN DAN KEBIJAKAN MONETER TERHADAP PEREKONOMIAN SUMATERA UTARA. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 41-49.
- Ramadhan, D. A. (n.d.). Tujuan dan Fungsi Kebijakan Fiskal Di Indonesia. 1-16.
- Rukiah, & Daulay, U. D. (2022). Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia: Tinjauan Ekonomi Syariah. *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu sosial dan Keislaman*, 73-90.
- Syamsuri, Rahmania, N., & Lahuri, S. B. (2022). KEBIJAKAN MONETER INDEPENDEN MENURUT IBNU KHALDUN DAN RELEVANSINYA TERHADAP STABILITAS EKONOMI INDONESIA. *Ekonomi Islam*, 186-200.